

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Jenderal Sudirman No 19

TANAH GROGOT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang 1 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanah Grogot, 26 Juli 2023

Sekretaris,



SUGIANTO, SH

NIP 19700705 199303 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
VI. Lampiran dan Daftar	35



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

JALAN JEND SUDIRMAN NO.19 TANAH GROGOT

TELEPON/FAXIMILE 0543 21155

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanah Grogot, 26 Juli 2022
Sekretaris,



SUGIANTO, SH
NIP 19700705 199303 1 007

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Semester I Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 6.510.951 atau mencapai 57 persen.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 1.993.049.575 atau mencapai 51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.044.845.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 18.024.620.881 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 55.630.658, Aset Tetap (neto) sebesar Rp 17.043.189.605 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 1.630.500. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 251.631.993 dan Rp 16.848.818.770.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 7.574.709, jumlah beban adalah juga sebesar Rp 2.716.579.951 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 2.709.005.242. Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa sebesar Rp 0 dan sehingga entitas masih pada posisi Defisit-LO sebesar Rp 2.709.005.242.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 16.848.818.770. Untuk Ekuitas Awal sebesar Rp 17.803.392.551, kemudian dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 2.709.005.242 kemudian dikurangi Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan sebesar Rp 320.210.763 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 2.074.642.224 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp 16.848.818.770.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATA TAN	30 Juni 2023		% thd Angg	30 Juni 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.439.000	6.510.951	57	7.152.966
JUMLAH PENDAPATAN		11.439.000	6.510.951	57	7.152.966
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2	2.866.236.000	1.443.582.029	50	1.405.024.573
Belanja Barang	B.3	1.168.609.000	608.213.396	52	572.652.606
Jumlah Belanja Operasi		4.034.845.000	2.051.795.425	51	1.977.677.179
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.4	10.000.000	0	0	86.794.641
Jumlah Belanja Modal		10.000.000	0	0	86.794.641
JUMLAH BELANJA		4.044.845.000	2.051.795.425	51	2.064.471.820

II. NERACA

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	51.000.000	60.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	9.309.800
Piutang Bukan Pajak	C.3	1.063.758	1.192.161
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.4	1.063.758	1.192.161
Persediaan	C.5	3.566.900	1.498.950
Jumlah Aset Lancar		55.630.658	72.000.911
ASET TETAP			
Tanah	C.5	14.452.813.000	14.452.813.000
Peralatan dan Mesin	C.6	2.207.848.108	2.332.870.228
Gedung dan Bangunan	C.7	6.356.791.185	6.356.791.185
Aset Tetap Lainnya	C.8	11.035.147	11.035.147
Akumulasi Penyusutan	C.9	(5.985.297.835)	(5.200.889.590)
Jumlah Aset Tetap		17.043.189.605	17.952.619.970
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	4.850.000	4.850.000
Aset Lain-lain	C.11	497.275.870	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(500.495.370)	(4.850.000)
Jumlah Aset Lainnya		1.630.500	0
JUMLAH ASET		17.100.450.763	18.024.620.881
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka KPPN	C.13	51.000.000	60.000.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	192.197.547	410.543.066
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	8.434.446	23.987.649
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.16	0	49.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		251.631.993	494.579.715
JUMLAH KEWAJIBAN		251.631.993	494.579.715
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	16.848.818.770	17.530.041.166
JUMLAH EKUITAS		16.848.818.770	17.530.041.166
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.100.450.763	18.024.620.881

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2023	30 Juni 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	7.574.709	8.345.127
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		7.574.709	8.345.127
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	1.606.645.576	1.757.280.189
Beban Persediaan	D.3	23.648.000	42.590.050
Beban Barang dan Jasa	D.4	310.599.417	337.432.702
Beban Pemeliharaan	D.5	249.123.781	212.238.956
Beban Perjalanan Dinas	D.6	36.291.932	20.047.300
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	490.271.245	447.846.347
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		2.716.579.951	2.817.435.544
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.709.005.242)	(2.809.090.417)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
POS LUAR BIASA		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.709.005.242)	(2.809.090.417)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2023	31 Juni 2022
EKUITAS AWAL	E.1	17.803.392.551	18.299.570.807
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.709.005.242)	(2.809.090.417)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS (*)	E.4	(320.210.763)	(17.758.078)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	(320.210.763)	(17.758.078)
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	2.074.642.224	2.057.318.854
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(954.573.781)	(769.529.641)
EKUITAS AKHIR	E.7	16.848.818.770	17.530.041.166

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Tanah Grogot

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Entitas berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 19 Tanah Grogot, Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkomitmen dengan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2. Peningkatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib administrasi perkara.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas pengawasan.
6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
7. Peningkatan pelayanan peradilan.
8. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
9. Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI yang sebelumnya terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), bertransformasi menjadi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dimana aplikasi ini mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada sebelumnya. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan fungsi SIMAK-BMN di dalam SAKTI adalah menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara

dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Piutang belum jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Piutang tidak dilunasi pada saat jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo;	10%
Diragukan	Piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	50%
Macet	Piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

*Penyusutan Aset
Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2018 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos

ekuitas pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2018.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp 6.510.951

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 6.510.951. Pendapatan Pengadilan Negeri Tanah Grogot terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2022		
	Estimasi	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	11.439.000	6.510.951	57
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	11.439.000	6.510.951	57

Realisasi pendapatan 30 Juni 2023 Diperoleh dari Anggaran Sewa Rumah Dinas.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan	6.510.951	7.152.966	(9.86)

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023

Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan			
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	6.510.951	7.152.966	(9.86)

Belanja

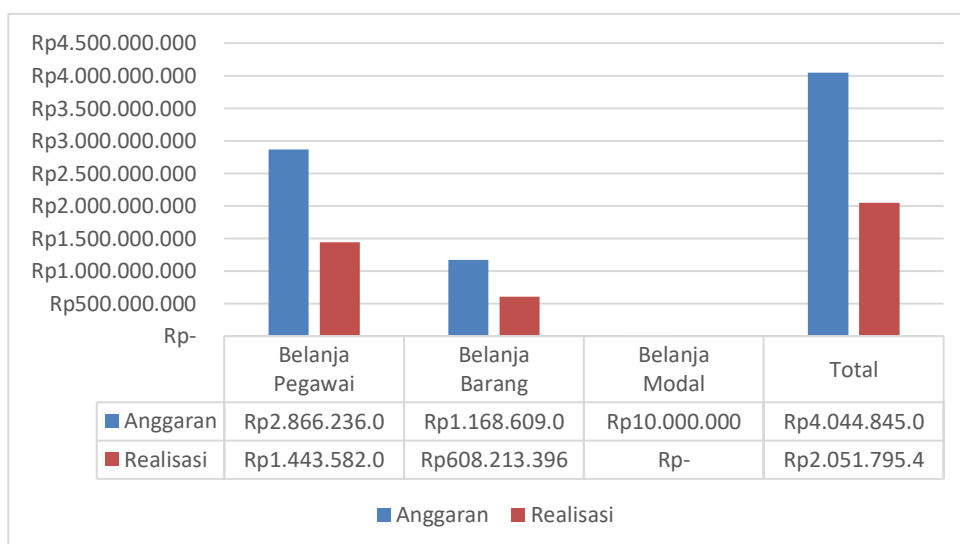
Realisasi belanja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 2.051.795.425 atau 51.00 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 4.044.845.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja
Negara
Rp 2.051.795.425

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 30 Juni 2022

Uraian	30 Juni 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Pegawai	2.866.236.000	1.443.582.029	50
Belanja Barang	1.168.609.000	608.213.396	52
Belanja Modal	10.000.000	0	0
Jumlah Belanja Kotor	4.044.845.000	2.051.795.425	51
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	4.044.845.000	2.051.795.425	51

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 0.62 persen dibandingkan realisasi belanja pada 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan karena beberapa realisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum maksimal, khususnya di belanja pegawai dan belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.443.582.029	1.757.280.189	(21.73)
Belanja Barang	608.213.396	572.652.606	5.85
Belanja Modal	0	86.794.641	(100)
Jumlah	2.051.795.425	2.064.471.820	(0.62)

B.2. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp
1.443.582.029

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.443.582.029 dan Rp 1.757.280.189.

Realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2023 mengalami penurunan sebesar 21.73 persen dari 30 Juni 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
30 Juni 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.443.582.029	1.757.280.189	(21.73)
Belanja Lembur	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai Kotor	1.443.582.029	1.757.280.189	(21.73)
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai	1.443.582.029	1.757.280.189	(21.73)

B.3. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp 608.213.396

Realisasi Belanja Barang 31 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 608.213.396 dan Rp 572.652.606. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2023 mengalami peningkatan sebesar 5.85 persen dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh pencabutan status pandemi covid-19 di tahun 2023, kemudian adanya kenaikan belanja barang operasional, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional (5211)	287.635.542	278.058.696	3,33
Belanja Barang Non Operasional (5212)	5.451.000	0	100,00
Belanja Barang Persediaan (5218)	25.019.000	34.272.500	(36,99)
Belanja Jasa (5221)	11.861.595	50.765.302	(327,98)
Belanja Pemeliharaan (5231)	241.954.327	189.508.808	21,68
Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241)	36.291.932	20.047.300	44,76
Jumlah Belanja Barang	608.213.396	572.652.606	5,85

B.4. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp 0

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 86.794.641.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

Uraian	REALISASI 30 Juni 2023	REALISASI 30 Juni 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (5321)	0	56.825.000	(100)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (5331)	0	29.969.641	(100)
Jumlah Belanja Modal Kotor	0	86.794.641	(100)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Modal	0	86.794.641	(100)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp 42.565.554

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 42.565.554 dan Rp 60.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
BRI 653244003021000	0	0
Uang Tunai	42.565.554	60.000.000
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	42.565.554	60.000.000

Belanja dibayar
dimuka (prepaid)
Rp 0

C.2. Belanja dibayar di muka (prepaid)

Jumlah belanja dibayar di muka per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 yang merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Rincian Belanja dibayar di muka (prepaid) adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja dibayar di muka (prepaid)

Keterangan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Belanja Gaji pokok PNS	0	0
Belanja pembulatan gaji PNS	0	0
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	0
Belanja Tunj. Anak PNS	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp 3.566.900

C.3. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 3.566.900 dan Rp 1.498.950.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Barang Konsumsi	3.566.900	1.498.950
Jumlah	3.566.900	1.498.950

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik Nomor : W18.U4/956 /PL.03 /06/2023 Tanggal 30 Juni 2023.

Tanah Rp.
14.452.813.000

C.4. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanah Grogot per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 14.452.813.000.

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	4.000 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 T.Grogot	8.175.960.000
2	1.256 m2	Jl.RM Noto Sunardi Tanah Grogot	2.012.112.000
3	1.200 m2	Jl.RM Noto Sunardi Tanah Grogot	1.904.400.000
4	493 m2	Jl.RA Kartini Tanah Grogot	828.240.000
5	1.007 m2	Jl.Gajah Mada Tanah Grogot	1.532.101.000
Jumlah			14.452.813.000

Peralatan dan
Mesin Rp
2.231.707.258

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.231.707.258 dan 2.538.374.978.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	2.699.953.878
Mutasi Tambah	37.290.000
Mutasi Kurang	505.536.620
Saldo per 31 Juni 2023	2.231.707.258
Akumulasi penyusutan s.d. 31 Juni 2023	1.689.695.162
Nilai Buku per 31 Juni 2023	518.152.946

Gedung dan
Bangunan Rp
6.377.896.769

C.6. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp 6.377.896.769 dan 6.377.896.769.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	6.377.896.769
Mutasi Tambah	967.417.128
Mutasi Kurang	967.417.128
Saldo per 30 Juni 2023	6.377.896.769
Akumulasi penyusutan s.d. 30 Juni 2023	4.295.602.673
Nilai Buku per 30 Juni 2023	2.061.188.512

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Gedung dan Bangunan

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1035 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	4.005.391.641
2	72 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	458.520.128
3	104 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	50.346.209

4	14 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	73.707.392
5	253 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	148.500.000
6	79 m2	Jl.Jenderal Sudirman No.19 Tanah Grogot	73.446.399
7	153 m2	Jln. Gajah Mada Tanah Grogot	426.209.000
8	90 m2	Jln. Gajah Mada Tanah Grogot	286.207.000
9	73 m2	Jln. R. A. Kartini Tanah Grogot	162.225.000
10	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173.336.000
11	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173.336.000
12	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173.336.000
13	78 m2	Jln. R.M. Noto Sunardi	173.336.000
Jumlah			6.377.896.769

Aset Tetap
Lainnya
Rp 11.035.147

C.7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 11.035.147 dan Rp 11.035.147. Aset tetap tersebut berupa buku-buku dipergustakaan.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
5.985.297.835

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 5.200.889.590. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Semester I tahun 2023*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.231.707.258	1.689.695.162	518.152.946
2	Gedung dan Bangunan	6.377.896.769	4.295.602.673	2.061.188.512
3	Aset Tetap Lainnya	11.035.147	0	11.035.147

Akumulasi Penyusutan	8.620.639.174	5.985.297.835	2.590.376.605
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*Aset Tak
Berwujud Rp
4.850.000*

C.9. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 4.850.000 dan Rp. 4.850.000.

*Aset Lain-lain Rp
497.275.870*

C.10. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 497.275.870 dan Rp 0.

*Akumulasi
Penyusutan/Amo
rtisasi Aset
Lainnya Rp
500.495.370*

C.11. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 500.495.370 dan Rp 4.850.000.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp 192.197.547*

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp 192.197.547 dan Rp 24.122.712. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga pada 30 Juni 2022 sebesar Rp 24.122.712 telah diselesaikan pembayaran dan penyalurannya kepada pihak ketiga yang berhak pada Januari 2023.

*Ekuitas Rp
16.848.818.770*

C.13. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 16.848.818.770 dan Rp 17.530.041.166. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp 6.510.951

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.510.951 dan Rp 7.152.966 Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2023 dan 2022*

Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	6.510.951	7.152.966
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah	6.510.951	7.152.966

Beban Pegawai
Rp
1.443.582.029

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.443.582.029 dan Rp 1.405.024.573. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.443.582.029	1.405.024.573
Jumlah	1.443.582.029	1.405.024.573

Beban
Persediaan
Rp 25.019.000

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 25.019.000 dan Rp 34.272.500. Beban

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang dan Jasa
Rp 304.948.137

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 304.948.137 dan Rp 328.823.998. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Beban Belanja Barang Operasional	287.635.542	278.058.696
Beban Belanja Barang Non Operasional	5.451.000	0
Beban Langganan Daya dan Jasa	11.861.595	50.765.302
Jumlah	304.948.137	328.823.998

Beban Pemeliharaan
Rp 241.954.327

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 241.954.327 dan Rp 189.508.808 dan Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2022

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181.470.244	127.710.055
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4.935.153	14.874.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.548.930	46.924.753
Jumlah	241.954.327	189.508.808

Beban Perjalanan
Dinas
Rp 36.291.932

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 36.291.932 dan Rp 20.047.300. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Beban Perjalanan Dinas	36.291.932	20.047.300
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
Jumlah	36.291.932	20.047.300

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp 489.627.745

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 489.627.745 dan Rp 484.610.731. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi karena adanya penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tak berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	121.647.776	125.214.868
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	367.979.969	359.395.863
Beban Amortisasi Software	0	0
Jumlah	489.627.745	484.610.731

Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp 0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan

dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional
30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022*

Uraian	30 Juni 2023	30 Juni 2022
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Penyesuaian Nilai BMN	0	187.500
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	187.500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
17.803.392.551*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 Juni 2023 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 17.803.392.551 dan Rp 18.299.570.807.

*Defisit LO Rp
2.709.005.242*

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.709.005.242 dan Rp 2.809.090.417. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

*Dampak
Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp 0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 yaitu Rp 0 dan Rp0.

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp 0*

E.4.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
Jumlah	0

E.4.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp 320.210.763

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 320.210.763. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp 0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang.

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas Rp
2.074.642.224

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.074.642.224 dan Rp 2.057.318.854 Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.051.795.425
Diterima dari Entitas Lain	(6.510.951)
Transfer Masuk	17.368.750
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	11.989.000
Jumlah	2.074.642.224

E.6. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir Rp
16.848.818.770*

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 16.848.818.770 dan Rp 17.530.041.166.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 653244003021000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp 0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 654444003031000 a.n. BPG 047 PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp 0.
3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Grogot A/C 021401000730305 a.n RPL 047 PN TANAH GROGOT UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp 93.124.842.

F.2. REVISI DIPA

Hingga 30 Juni 2023. Pengadilan Negeri Tanah Grogot melakukan 1 kali Revisi DIPA.

F.3. RALAT SPM. SP2D. SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 30 Juni 2023. Pengadilan Negeri Tanah Grogot tidak ada mengajukan ralat SPM. SP2D. SSBP dan SSPB.

F.4. PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI

Hingga 30 Juni 2023. Pengadilan Negeri Tanah Grogot belum terdapat Nilai Pagu Minus.

F.5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U4/1786a/KU.01/12/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerima/Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun Anggaran 2023. sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran : SUGIANTO. SH

Pejabat Pembuat Komitmen : SUGIANTO. SH

Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM : MUHYIDIN. SH

Bendahara Pengeluaran : IRWAN D

Bendahara Penerimaan : AGUS MUHARI

Petugas Pengelolaan
Administrasi Belanja Pegawai : NUR AENAH MAGHVIRA,
A.Md.A.B.

Petugas Pengelolaan Aset : ARJUDUS SADA ARIHTA
ANGKAT, A.Md.